

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus, 1993, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Hasan, A. Masjedi, 2009, *Kontrak Migas Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikhai Aneska, Jakarta
- H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.S., Salim, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1974, *Mining Law*, LPH-FH Unpad, Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Lubiantara, Benny, 2012, *Ekonomi Migas*, Grasindo, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasir, Abdul, 2014, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Nasir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Partowidagdo, Widjojono, 2009, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Bandung Development Studies Foundation, Bandung
- Prabantoro, AM. Putut, 2014, *Migas the Untold Story*, Gramedia, Jakarta
- Shobah, Shofia dan Patricia Audrey, 2015, *Cost Recovery dalam Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia ditinjau dari Hukum Kontrak Internasional*, Universitas Brawijaya Press, Malang

Soemitro, Ronny Hannitijo, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sukanto dan Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

_____, 1987, *Handbook of Public Economics Vol. II Edited by AJ. Auerbach and M. Feldstein*, Elsevier Science Publisher B.V., Holland

B. MAKALAH

Ashong, Marcia, 2013, *Cost Recovery in Production Sharing Contract: Opportunity for Striking It Rich or Just Another Risk not for Bearing*, University of Dundee, USA

Bindemann, Kirsten, 1999, *Production Sharing Agreement*, Journal from Oxford Institute for Energy Studies

Buletin Minyak dan Gas Bumi (BUMI) SKK Migas Edisi Januari 2017

Buletin Minyak dan Gas Bumi (BUMI) SKK Migas Edisi Februari 2017

Gusmestad, Ove Tobias and Anatoly B. Zolotuchin, Erik T. Jarlsby, 2004, *Development of Petroleum Resources with Emphasis on Offshore Fields*, WIT Press, diakses melalui Wikipedia pada 6 Juni 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, *Kajian Analisis Isu-isu Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Kedaulatan Energi, Kementerian Hukum dan HAM, 2016

Mandelson, Peter. *Energy security and climate change – what role for the trade policy?* - Energy Security and Climate Change Conference, Oslo, Norway, 2 February 2007

Nakhle, Carole. *Petroleum Taxation: Sharing the Oil Wealth: A Study of Petroleum Taxation Yesterday, Today and Tomorrow*. Routledge Studies in International Business and the World Economy, 2008

Oil and Gas for Asia: Geopolitical Implications of Asia's Rising Demand. National Bureau of Asian Research. September 2012

Waterous, Jeffry, 2004, *Challenges and Opportunities to Develop Upstream Business in Indonesia*, Bimasena International Conference

The Central Bank of Russia, 2011, *Production Sharing Agreement*, 24th Meeting of IMF Committee on Balance of Payment Statistics

The Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 2007, *Model Production Sharing Contract*, Cyprus

-----, *Qualitative Cost Benefit Analysis on Evaluation of Stronger Families and Communities Strategy 2000-2004*, RMIT University Circle, 2008

C. BERITA ELEKTRONIK

Abdullah, Iqbal Alan, <http://www.indomigas.com/perlukah-cost-recovery-dibatasi/>, diakses pada 16 Februari 2017

-----, Penolak Gross Split Migas Bertambah, Ini Alasannya, <http://m.inilah.com/news/detail/2345547/penolak-gross-split-migas-bertambah-ini-alasannya>, diakses pada 4 Februari 2017

-----, Alasan Pemerintah Memilih Kontrak Bagi Hasil, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51076aad6703a/alasan-pemerintah-memilih-kontrak-bagi-hasil>, diakses pada 22 Mei 2017

Sucipto, Purnomo, <http://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada 8 Juni 2017

-----, *10 Best Countries to Invest*, <https://www.usnews.com/news/best-countries/invest-in-full-list>, diakses pada 25 Juni 2017

-----, Konvensi Keanekaragaman Hayati, <https://jurnalbumi.com/konvensi-keanekaragaman-hayati/> diakses pada 25 Juni 2017

-----, APBN P 2015: Penerimaan Migas Turun Rp. 187,67 Trilyun <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/2016%20NK%20APBNP.pdf> diakses pada 25 Juni 2017

Sofyan, Edy. Skema Bagi Hasil *Gross Split* Kurang Menarik Bagi Investor Migas, <https://kumparan.com/edy-sofyan/skema-bagi-hasil-gross-split-kurang-menarik-bagi-investor-migas> diakses pada 25 Juni 2017

-----, Investasi Migas Kuartal 1 Tahun 2017, <https://pemeriksaanpajak.com/2017/05/17/investasi-sektor-migas-kuartal-1-2017-merosot/> diakses 25 Juni 2017

-----, *Crude Oil Price History Chart*, <http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=5y> diakses 25 Juni 2017

D. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Internationap Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Tahun 1966

United Nations Convention on Biological Diversity Tahun 1992

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Undang-Undang No. 05 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 (UU No. 30 Tahun 2007) tentang Energi

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas

Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Hulu Migas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.8 Tahun 2017 tentang *Gross Split*